

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum terutama berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap sebagai suatu hal yang lazim terjadi di negara ini.

Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan tercapai secara hemat, efisien, dan efektif.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal,

Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota. BPKP sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKP dalam melaksanakan kegiatannya dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu audit, konsultasi, asistensi dan evaluasi (Wati dkk, 2010).

Fungsi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit adalah melakukan audit eksternal diantaranya pemeriksaan terhadap proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan desentralisasi, pemeriksaan khusus (audit investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang itu membutuhkan keahlian dibidangnya, dan pemeriksaan terhadap pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri (Sukriyah dkk, 2009 dalam Wati dkk, 2010).

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam menjalankan tugasnya tentu harus memperhatikan kode etik dan standar audit. Kode etik ditujukan agar auditor menjaga perilakunya dalam menjalankan tugasnya. Standar audit juga harus diterapkan oleh auditor guna menjaga mutu hasil audit yang telah dihasilkan oleh auditor (Trisnaningsih, 2007). Kode etik dan standar audit inilah yang nantinya menjadi modal awal auditor untuk dipublikasikan kepada masyarakat ataupun untuk pengguna laporan sehingga peran auditor akan lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya. Karena

peran auditor sangat penting dalam mendukung BPKP yang nantinya melakukan pemeriksaan.

Pada Era globalisasi saat ini banyak sekali terjadi kasus-kasus hukum yang melibatkan manipulasi akuntansi. Profesi auditor telah menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Kurangnya independensi auditor dan maraknya manipulasi akuntansi korporat membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan auditan mulai menurun, sehingga para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditur mempertanyakan kinerja akuntan publik sebagai pihak independen. Krisis moral dalam dunia bisnis yang mengemuka adalah kasus Enron Corporation.

Enron sebelumnya dinyatakan wajar tanpa pengecualian oleh kantor akuntan Arthur Anderson, salah satu kantor akuntan publik (KAP) dalam jajaran *big four*, namun secara mengejutkan pada 2 Desember 2001 dinyatakan pailit. Kepailitan tersebut salah satunya karena Arthur Anderson memberikan dua jasa sekaligus, yaitu sebagai auditor dan konsultan bisnis (Santoso, 2002). Kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Gideon, 2005 dalam Wati dkk, 2010).

Seorang auditor dalam melaksanakan pemeriksaan, memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Klien dapat mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan mungkin

bertentangan dengan kepentingan para pemakai laporan keuangan. Demikian pula, kepentingan pemakai laporan keuangan yang satu mungkin berbeda dengan pemakai lainnya. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, akuntan publik harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun kepentingan akuntan publik itu sendiri.

Seorang auditor dituntut untuk mempunyai kinerja yang baik di BPKP. Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar), di mana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan (Trisnaningsih, 2007).

Salah satu faktor untuk mendukung kinerja yang baik adalah Independensi. Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Artinya auditor seharusnya berada dalam posisi yang tidak memihak siapapun karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan

fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2002).

Dalam menunjang kesuksesan kinerja seseorang dalam pekerjaan tentunya harus menunjang tinggi hal-hal yang menjadi landasan pekerjaannya. faktor kesenangan, lingkungan, dan komitmen adalah sesuatu yang menjadi pendukung tercapainya kinerja seseorang secara maksimal. Kesenangan adalah suatu hal yang mendukung kinerja seseorang menjadi lebih baik dikala seseorang tersebut merasa senang akan pekerjaannya. Faktor lingkungan berguna dalam memberikan imbas positif guna memperoleh hasil kinerja yang memuaskan karena dengan lingkungan yang kondusif akan saling mendukung tercapainya kinerja yang maksimal. Komitmen adalah dasar seseorang sebelum mengambil pekerjaan yang akan digelutinya karena komitmen merupakan konsistensi guna wujud keterikatan seseorang akan pekerjaannya.

Faktor lain sikap auditor yang harus dimiliki di BPKP adalah gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi kinerja auditor. Gaya kepemimpinan merupakan cara pimpinan untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendak pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi. Menurut Alberto *et al.*, (2005) dalam Wati dkk (2010) kepemimpinan berpengaruh positif kuat terhadap kinerja. Penelitian ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Wati dkk (2010) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif

signifikan terhadap kinerja auditor. Temuan ini memberikan indikasi bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kinerja bawahannya, di samping itu untuk mendapatkan kinerja yang baik diperlukan juga adanya pemberian pembelajaran terhadap bawahannya.

Dalam mengukur kinerja auditor, menurut Larkin (1990) dalam Trisnaningsih (2007) terdapat empat dimensi personalitas, yaitu kemampuan, komitmen profesional, motivasi, dan kepuasan kerja. Seorang auditor yang mempunyai kemampuan dalam hal auditing maka akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan. Auditor yang komitmen terhadap profesinya maka akan loyal terhadap profesinya seperti yang dipersepsikan oleh auditor tersebut. Motivasi yang dimiliki seorang auditor akan mendorong keinginan individu auditor tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Kepuasan kerja auditor adalah tingkat kepuasan individu auditor dengan posisinya dalam organisasi secara relatif dibandingkan dengan teman sekerja atau teman seprofesi lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta pendapat dalam penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Pemahaman Good Governance, Konflik Peran, dan Ketidakjelasan terhadap kinerja Auditor pemerintah (studi pada Auditor pemerintah di BPKP perwakilan Yogyakarta)”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari Wati dkk (2010). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan sampel penelitian adalah auditor pemerintah yang bekerja di Kantor Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Yogyakarta pada tahun 2011. Penelitian ini juga menambah variabel konflik peran dan ketidakjelasan peran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah?
3. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah?
4. Apakah pemahaman *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah?
5. Apakah konflik peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor?
6. Apakah ketidakjelasan peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh positif independensi terhadap kinerja auditor pemerintah.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh positif komitmen organisasi terhadap kinerja auditor pemerintah.

3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh positif gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor pemerintah.
4. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh positif pemahaman good governance terhadap kinerja auditor pemerintah.
5. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh negatif konflik peran terhadap kinerja auditor pemerintah.
6. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh negatif ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi:

1. Pemerintah di BPKP perwakilan Yogyakarta guna meningkatkan kinerja auditor agar semakin baik.
2. Auditor lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas seorang auditor yang profesional.
3. Diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi KAP khususnya auditor dalam menjalankan pemeriksaan akuntansi (*auditing*).